

RENJA SKPD
BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ilmulah

sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Alamat Jalan Panglima Batur No. 51 Kandangan 71211, Telpon (0517) 21242 Faks. (0517) 21242 dapat terselesaikan dengan baik.

Renja SKPD Tahun 2020 merupakan Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020, sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi tercapainya target dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan secara bertahap dapat mencapai Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020.

Semoga Rencana Kerja Tahunan SKPD ini dapat memberikan gambaran Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Amin Ya Rabbal Alamin.

Kandangan, Maret 2019
Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Hulu
Sungai Selatan,



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690919 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .	4
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	5
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	6
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	7
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	10
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	10
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	10
3.3. Program dan Kegiatan.....	10
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah menyusun Rancangan Rencana pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Dimana sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Sesuai RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023 yang visi **“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sehati Plus CINTA “**.

Berkaitan dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah menyiapkan Renja – SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). Oleh karena itu, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kesempatan ini menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-SKPD) tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dalam rangka sinkronisasi dan konsistensi dengan dokumen perencanaan lainnya didasarkan pada:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
- 2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Asas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
 - 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 7) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018;
 - 8) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Stuktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Memberikan arah bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga tujuan, sasaran dan program serta kegiatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stackholders*) tentang rencana pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Menjadi kerangka acuan bagi dinas dalam upaya meningkatkan kualitas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dari Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :

- a. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Keuangan Daerah serta Kesekretariatan;

- b. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan yang terencana dan akuntabilitas;
- c. Memberikan pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan Hukum, maksud, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu, menjelaskan secara rinci, Evaluasi pelaksana Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Tahun lalu dan capaian Renstra Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Analisis Kinerja Pelayanan SKPD dan Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan secara rinci, Telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Organisasi Perangkat Daerah (SKPD), Program dan Kegiatan;

Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Renja SKPD Tahun 2018 secara keseluruhan telah terakomodir dalam program dan kegiatan pada APBD Tahun Anggaran 2018. Program Utama SKPD adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu Anggaran sebesar Rp. 10.174.439.600,- telah dilaksanakan dengan capaian Realisasi sebesar Rp. 8.159.021.589,- , secara rinci kegiatan – kegiatan program dimaksud dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Realisasi Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah

INDIKATOR	PAGU	REALISASI*	%
1. Penyusunan Standar Satuan Harga	78.450.000	61,390,000	78.25
2. Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	56.630.000	23,961,000	42.31
3. Penyusunan KUA dan PPAS	44.240.000	17,610,000	39.81
4. Penyusunan APBD	330.350.000	212,606,800	64.36
5. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	38.900.000	3,528,000	9.07
6. Penyusunan Perubahan APBD	575.225.000	431,262,800	74.97
7. Penyusunan Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	40.980.000	10,300,000	25.13
8. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaks APBD	60.072.000	57,354,000	95.48
9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	50.072.000	46,590,000	93.05
10. Penyusunan Sistem Informasi dan Verifikasi Data Keuangan Daerah	451.060.000	354,500,000	78.59
11. Peningkatan Manajemen Aset /BMD	256.106.000	146,907,000	57.36
12. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	172.835.000	128,775,610	74.51
13. Inventarisasi Barang/ Aset Daerah	219.498.000	188,769,000	86.00
14. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan	532.595.600	419,123,100	78.69
15. Pengamanan Barang/Aset Daerah	590.375.000	224,067,280	37.95
16. Penyusunan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis	17.000.000	17,000,000	100.00
17. Penyediaan dok. PBB P2 dan BPHTB	95.266.000	95,266,000	100.00
18. Penyediaan cetak, cetak SPTPD dan Karcis	113.604.800	105,438,875	92.81

INDIKATOR	PAGU	REALISASI*	%
19. Penyusunan Laporan Keuangan Pemda	88.700.000	85,550,000	96.45
20. Penyusunan Laporan Triwulan Keuangan Daerah	68.420.000	67,370,000	98.47
21. Penyaluran dana hibah dan bantuan social	40.700.000	18,858,000	46.33
22. Peningkatan dan Pemeliharaan SIMDA	39.900.000	36,230,000	90.80
23. Penyusunan RKBMD dan RKPMD	54.286.400	39,146,760	72.11
24. Fasilitasi Majelis TP-TGR	51.750.000	36,080,800	69.72
25. Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	5.563.053.800	4,879,444,600	87.71
26. Pengelolaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	21.800.000	21,659,964	99.36
27. Pengelolaan Aset Rumah Dinas	467.500.000	426,692,000	91.27
28. Pendampingan Penyusunan RKA	21.370.000	3,540,000	6.43

2.1.1. Capaian Renstra SKPD

Capaian Renstra SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai saat ini, secara ringkas dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Bakeuda Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp	126,371,479,600	131,622,310,850.62
		2. Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD	Waktu	<09 Oktober 2018	03 Sept. 2018
		3. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Waktu	≤ 31 Maret 2018	29 Maret 2018
		4. Persentasi SP2D Dengan Sumber Dana dan Kode Rekening Yang Tepat	%	100	100%
2.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	1. Persentase data rincian total BMD dengan aset di neraca Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	%	100	100%
3.	Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima	1. Hasil Evaluasi SAKIP	Predikat	BB	BB

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kebijakan pembangunan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dan urusan pemerintahan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Badan Keuangan Daerah mempunyai 5 (lima) Program yakni ; 4 (empat) program rutin dan 1 (satu) program operasional yang diimplementasikan dalam 45 (empat puluh lima) kegiatan. Kinerja yang sesuai SPM maupun IKK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tidak ada pada Badan Keuangan daerah sedangkan Pelayanan yang ada di Badan Keuangan Daerah antara lain meliputi :

1) Pelayanan Penerbitan SP2D

Pelayanan Penerbitan SP2D bagi Aparatur Sipil Negara dan Pihak Ketiga/Masyarakat saat ini sudah berjalan baik dengan didukung oleh Aplikasi SIMDA Keuangan yang bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan.

2) Pembayaran PBB-P2 dan BPHTB

Pelayanan dalam pencetakan dan pembuatan PBB-P2 dan BPHTB serta pembayaran PBB-P2 dan BPHTB yang akan disetorkan ke Kas Daerah melalui aplikasi SIM PBB.

3) Penyaluran Bansos dan Hibah

Penyaluran Hibah dan bansos saat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang penyaluran Hibah dan Bansos.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sesuai Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- b. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Badan Keuangan Daerah;

- c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pelayanan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
- f. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan Keuangan Daerah; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi tersebut diatas ada beberapa isu penting (Isu Strategis) yaitu "Perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN. Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yang berdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii) perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) ecommerce"

2.2. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Pada Renja SKPD Tahun 2019 ini, tidak jauh berbeda dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program dan Kegiatan Renja SKPD berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sesuai Renstra Badan Keuangan Daerah.

Semua Program dan kegiatan yang sesuai RENSTRA Badan Keuangan Daerah Pengukuran Pencapaian Sasarannya dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

RANCANGAN AWAL						ANALISIS KEBUTUHAN					
NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	
				Target Kinerja	Anggaran					Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pelayanan Administrasi Perkantoran						Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun	150,000,000	1	1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun	150,000,000
	2. Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD			33,000,000	2	2. Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD			33,000,000
	3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD			14,000,000	3	3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD			14,000,000
	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	SKPD			282,250,000	4	4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	SKPD			282,250,000
	5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran	SKPD			282,150,000	5	5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran	SKPD			282,150,000
	6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD			924,929,499	6	6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD			924,929,499
Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur						Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur					
1	7. Pembangunan gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Buah	968,000,001	7	7. Pembangunan gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Buah	968,000,001
	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD			4 Buah	20,000,000	8	8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			SKPD
	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	270,209,400	9	9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	270,209,400
	10. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD			58,350,000	10	10. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD			58,350,000
		11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	172,000,000	11	11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun
Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah						Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah					
	12. Majelis TP - TGR	SKPD	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	10,550,000	12	12. Majelis TP - TGR	SKPD	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	10,550,000
		13. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah			SKPD	9,000,000	13	13. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah			SKPD
Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	14. Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok	4,700,000	14	14. Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok	4,700,000
	15. Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok.	4,700,000	15	15. Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok.	4,700,000
Peingkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah						Peingkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah					
2	1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	273 Dok	50,560,000	1	1. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	273 Dok	50,560,000
	2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN	21 Dok	6,120,000	2	2. Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN	21 Dok	6,120,000
	3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	54,660,000	3	3. Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	54,660,000
	4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	42,478,000	4	4. Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	42,478,000
	5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	1 Dok	90,220,000	5	5. Peny. Laporan Keuangan Pemda	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	1 Dok	90,220,000
Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah						Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah					
	1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	30,800,000	1	1. Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	30,800,000
	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	100%	27,300,000	2	2. Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	100%	27,300,000

RANCANGAN AWAL					ANALISIS KEBUTUHAN						
NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		NO	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	
				Target Kinerja	Anggaran					Target Kinerja	Anggaran
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah					Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah						
1.	Penyusunan Dokumen DPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPA	370 Dokumen	47,820,000	1.	Penyusunan Dokumen DPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPA	370 Dok	47,820,000
2.	Bimtek Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA	73 Org	9,850,000	2.	Bimtek Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA	73 Org	9,850,000
3.	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dok	41,994,000	3.	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dok	41,994,000
4.	Penyusunan Dokumen DPPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	74	51,400,000	4.	Penyusunan Dokumen DPPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	74	51,400,000
5.	Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	SKPD	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	273 Sekolah	31,410,000	5.	Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	SKPD	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	273 Sekolah	31,410,000
6.	Penyusunan Rancangan APBD	SKPD	Jumlah Dokumen APBD	6 Dok	127,900,000	6.	Penyusunan Rancangan APBD	SKPD	Jumlah Dokumen APBD	6 Dok	127,900,000
7.	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	SKPD			119,800,000	7.	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	SKPD			119,800,000
8.	Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	SKPD	Jumlah Pergeseran APBD	3 Dok	41,350,000	8.	Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	SKPD	Jumlah Pergeseran APBD	3 Dok	41,350,000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD					Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD						
1.	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	4 Kali	183,575,000	1.	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	4 Kali	183,575,000
2.	Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	SKPD	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm	25 Persil	600,850,000	2.	Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	SKPD	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm	25 Persil	172,000,000
			Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik	75 Persil		0 Rp	0	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik	75 Persil		
3.	Peningkatan Manajemen Aset /BMD	SKPD	Jumlah BMD yang dimusnahkan	500 Item Barang	129,575,000	3.	Peningkatan Manajemen Aset /BMD	SKPD	Jumlah BMD yang dimusnahkan	500 Item Barang	172,000,000
			jumlah jenis BMD yang dipindahtanggankan	2 Jenis					jumlah jenis BMD yang dipindahtanggankan	2 Jenis	
4.	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dok	48,450,000	4.	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dok	48,450,000
5.	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	56 Buah	1,326,975,000	5.	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	56 Buah	1,326,975,000
6.	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	3 Buah	807,050,000	6.	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	3 Buah	807,050,000
Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan					Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan						
1.	Penyediaan Karcis dan Blanko	SKPD	Jumlah Jenis Karcis dan Blangko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	159,073,000	1.	Penyediaan Karcis dan Blanko	SKPD	Jumlah objek -Objek Pajak Daerah	50 WP	159,073,000
2.	Promosi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Dana Perimbangan	4 Kali	230,500,000	2.	Promosi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Jenis Karcis dan Blangko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	230,500,000
Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB					Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB						
1.	Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	67.328 WP	162,909,500	1.	Pemutakhiran PBB - P2 dan BPHTB	SKPD	Jumlah objek-objek PBB-P2 dan BPHTB	67.328 WP	162,909,500
2.	Pelayanan PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu	67.328 Lbr	474,135,000	2.	Pelayanan PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Dokumen SPPT PBB-P2 dan BPHTB yang diterbitkan tepat waktu	67.328 Lbr	474,135,000
3.	Promosi PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	2 Kali	84,290,000	3.	Promosi PBB dan BPHTB	SKPD	Jumlah Promosi PBB - P2 dan BPHTB	2 Kali	84,290,000

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan
2. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Dari 2 (dua) target kebijakan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah
2. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Sesuai dengan Renstra SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tujuan dan sasaran.

3.2.1 Tujuan

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif yang berdampak terhadap angka kemiskinan
- b. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi

3.2.2 Sasaran

Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Berdasarkan RENSTRA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sejalan dengan arah kebijakan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut diatas, dan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka secara rinci program dan kegiatan dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.1

Tabel 3.1

Daftar Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Kab.HSS

Tahun 2020

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2020	
			Target Kinerja	Anggaran
2	3	4	5	6
Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	SKPD	Pelayanan Administrasi sesuai standar	1 Tahun	150,000,000
2. Penyediaan Makanan dan Minuman	SKPD			33,000,000
3. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok Dan Fungsi SKPD	SKPD			14,000,000
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm./ Teknis Perkantoran	SKPD			282,250,000
5. Penyediaan Jasa dan Administasi Perkantoran	SKPD			282,150,000
6. Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	SKPD			924,929,499
Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur				
7. Pembangunan gedung kantor	SKPD	Gedung Kantor Dalam Kondisi Baik	1 Buah	968,000,001
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	SKPD		4 Buah	20,000,000
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Peralatan dan Perlengkapan kantor dalam Kondisi Baik	1 Tahun	270,209,400
10. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD			58,350,000
11. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	SKPD	Mobil dan Kendaraan Operasional Kondisi Baik	1 Tahun	172,000,000
Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah				
12. Majelis TP - TGR	SKPD	Pelayanan Perangkat Daerah Sesuai Standar	1 Tahun	10,550,000
13. Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	SKPD			9,000,000
Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
14. Penyusunan Dokumen AKIP	SKPD	Jumlah Dokumen AKIP yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok	4,700,000
15. Penyusunan Dokumen Keuangan	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang memenuhi Aspek Kualitas	1 Dok.	4,700,000

Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		
			Target Kinerja	Anggaran	
2	3	4	5	6	
Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah					
1.	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi BOS	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi BOS	273 Dok	50,560,000
2.	Penyusunan Dokumen Rekonsiliasi JKN	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi JKN	21 Dok	6,120,000
3.	Peny. Ranc. Peraturan KDH Ttg Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perbub Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	54,660,000
4.	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	Jumlah Ranc. Perda Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaks. APBD	2 Dok	42,478,000
5.	Peny. Laporan Keuangan Pemda	SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Daerah yang memenuhi aspek Kualitas	1 Dok	90,220,000
Pengelolaan Adm. Dan Penatausahaan Keuangan Daerah					
1.	Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Kasda	SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi Kasda	73 PA/KPA	30,800,000
2.	Penyaluran Dana Hibah dan Bansos	SKPD	Persentasi Penyaluran Dana Hibah dan Bansos yang tepat waktu	100%	27,300,000
Pengelolaan Anggaran Keuangan Daerah					
1.	Penyusunan Dokumen DPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPA	370 Dokumen	47,820,000
2.	Bimtek Penyusunan RKA SKPD	SKPD	Jumlah Peserta Bimtek Penyusunan RKA	73 Org	9,850,000
3.	Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS	SKPD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS	4 Dok	41,994,000
4.	Penyusunan Dokumen DPPA	SKPD	Jumlah Dokumen DPPA	74	51,400,000
5.	Bimtek Penyusunan RKA Sekolah	SKPD	Jlh Sekolah yang mengikuti Bimtek Penyusunan RKAS	273 Sekolah	31,410,000
6.	Penyusunan Rancangan APBD	SKPD	Jumlah Dokumen APBD	6 Dok	127,900,000
7.	Penyusunan Rancangan Perubahan APBD	SKPD			119,800,000
8.	Penyusunan Dokumen Pergeseran APBD	SKPD	Jumlah Pergeseran APBD	3 Dok	41,350,000
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan BMD					
1.	Pemutakhiran Data Barang Milik Daerah	SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD dengan SKPD	4 Kali	183,575,000
2.	Penyediaan Sarana Pengamanan Barang/Aset Daerah	SKPD	Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Adm	25 Persil	600,850,000
			Jumlah Tanah pemerintah Daerah Yang diamankan secara Fisik	75 Persil	
3.	Peningkatan Manajemen Aset /BMD	SKPD	Jumlah BMD yang dimusnahkan	500 Item Barang	129,575,000
			Jumlah Jenis BMD yang dipindahtanganan	2 Jenis	
4.	Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD	SKPD	Jumlah Dokumen RKBMD dan RKPBMMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2 Dok	48,450,000
5.	Pengadaan Aset Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	Jumlah Kendaraan Dinas hasil Pengadaan	56 Buah	1,326,975,000
6.	Pengelolaan Aset Rumah Dinas	SKPD	Jumlah Rumah Dinas yang Direnovasi	3 Buah	807,050,000
Peningkatan PAD dan Dana Perimbangan					
1.	Penyediaan Karcis dan Blanko	SKPD	Jumlah Jenis Karcis dan Blanko Pajak dan Retribusi Daerah	73 Jenis	159,073,000
2.	Promosi Pajak Daerah	SKPD	Jumlah Laporan Realisasi Dana Perimbangan	4 Kali	230,500,000
Peningkatan Pengelolaan PBB dan BPHTB					

BAB IV

PENUTUP

Renja SKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020. Renja SKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk tahun anggaran 2020 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dalam rangka pencapaian sasaran program-program kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran”, selanjutnya mengisyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tetap menerapkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Badan Keuangan Daerah akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Renja SKPD TA.2020, dalam kaitan itu, diharapkan DPRD bersama masyarakat perlu memberikan dukungan sepenuhnya agar program-program tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Renja TA.2020 tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju, dan disiplin dari semua pihak.

